

**EVALUASI KINERJA PENCAIRAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) SETELAH MENGGUNAKAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



DIOSI APRINALDO

07011181419041

Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EVALUASI KINERJA PENCAIRAN GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) SETELAH MENGGUNAKAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

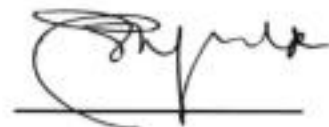
DIOSI APRINALDO

NIM. 07011181419041

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2018

Pembimbing I

**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 197805122002121003**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
Nip. 198108272009121002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Evaluasi Kinerja Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setelah Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan." telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 Juni 2018.

Palembang, 5 Juni 2018

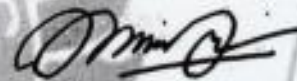
Ketua

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP.197805122002121003



Anggota

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



3. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 1967041219920332002



Mengetahui,
Dekan FISIP

ILMU ALAT PENGABDIAN

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Yakinkan dengan iman usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal“.

(Diosi Aprinaldo)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua orangtuaku Tercinta*
- 2. Adik-Adikku tersayang*
- 3. Keluarga Besar*
- 4. Almamaterku*

ABSTRACT

The title of this research, “Performance Evaluation of Liquefaction Salary Governmental Officers After Using Region Management Application Information System in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly”, which is backgrounded by being late liquefaction of governmental officers in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly. The purpose of this research to evaluate performance of liquefaction salary governmental officers in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly. The type of this research is descriptive, whereas research method which used is qualitative method. The type of data which used is primary data and secondary data, whereas collecting data technics are documentation, observation, and depth interview. Focuss of this research used Mardiasmo Theory about Performance Evaluation. The result shows us if liquefaction salary governmental officers after using region management application information system in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly, there are some problems, like being late in coordinating between each sector in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly, bad connection of Internet network, limited of computers which connected into Region Management Application Information System, and limited of officers who have qualification or competence in going through Region Management Application Information System. There are some of solutions, like the officers in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly must be holding officers qualification coaching to operate Region Management Application Information System, repairing coordination between each sector in Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly, and adding some officers who have qualification or competence in going through Region Management Application Information System so that performance evaluation of liquefaction can go effectively.

Key Words: Evaluation Performance, Liquefaction Salary, Secretariat of Sumatera Selatan Province Assembly

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “*Evaluasi Kinerja Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setelah Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan*”, yang dilatarbelakangi oleh keterlambatan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jenis penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Fokus penelitian ini menggunakan Teori Mardiasmo tentang Evaluasi Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa masalah, seperti lambatnya kordinasi antar bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera selatan, tidak baiknya koneksi jaringan internet, terbatasnya jumlah komputer yang terhubung dengan program aplikasi SIMDA, dan terbatasnya jumlah petugas yang memiliki kualifikasi/kompetensi dalam menjalankan program SIMDA. Adapun saran yang penulis berikan adalah pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menyelenggarakan pelatihan kualifikasi pegawai untuk mengoperasikan aplikasi SIMDA, perbaikan koordinasi antar-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan adanya penambahan jumlah petugas yang memiliki kualifikasi/kompetensi dalam menjalankan program SIMDA agar kinerja pencairan gaji dapat berjalan dengan efektif.

Kata kunci : Evaluasi Kinerja, Pencairan Gaji, Sistem Informasi Manajemen Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memeberikan Rahmat dan hidayah-Nya dan memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kinerja Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setelah Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada konsentrasi Keuangan Negara Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tuaku tercinta, adik-adikku tersayang serta seluruh keluarga besar penulis. penulis menghaturkan banyak terimakasih atas do'a serta arhannya, sehingga penulis selalu bisa melangkah dengan pasti.
2. Prof.Dr. Anis Saggaff, MSCE. Selaku rektor universitas sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Dra. Retno Susilowaty, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing di kegiatan Akademik.

6. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Pimpinan dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang menerima penulis melakukan penelitian dan sering memberi masukan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan AN Indralaya angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teman-teman kelas ganjil dan teman-teman yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menulis skripsi dan penulis juga berharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan ini dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Indralaya, Juni 2018

Penulis

Diosi Aprinaldo

NIM. 0701118141904

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Evaluasi	11
1. Pengertian Evaluasi	11
2. Evaluasi Kinerja	12
3. Tujuan Evaluasi Kinerja.....	13
4. Manfaat Evaluasi Kinerja.....	14
B. Konsep Gaji	14
1. Pengertian Gaji	14
2. Pencairan Gaji	15
3. Evaluasi Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	15
C. Konsep Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	16
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	16
2. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	17
3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	17
4. Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	18
5. Kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	18
6. Keunggulan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	18
7. Cara Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	19
D. Kerangka Pikir.....	19
E. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	25
B. Definisi Konsep	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Unit Analisis	27
E. Informan Penelitian	27
F. Data dan Sumber Data	28
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisa Data	30

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum	32
1. Sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan	32
2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	34
3. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	45
4. Pimpinan DPRD	51
B. Pembahasan	53
1. Informasi Finansial.....	54
a) Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017	54
b) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017	60
2. Informasi Non Finansial.....	67
a) Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	67
b) Kemampuan Pegawai Dalam Menyelesaikan Pekerjaan	77
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	 85
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 : Bagan Susunan Organisasi sekretariat DPRD Prov. Sumsel.....	35
Gambar 4.2 : Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	49
Gambar 4.3 : <i>Job description</i> Bagian Keuangan Dan Sub Bagian Anggaran.....	56
Gambar 4.4 : SOP Pembuatan Rencana Kerja Anggaran.....	58
Gambar 4.5 : Pemendagri No 21 Tahun 2011	62
Gambar 4.6 : SOP Pembuatan Realisasi Anggaran.....	64
Gambar 4.7 : Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	68
Gambar 4.8 : Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	69
Gambar 4.9 : Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	69
Gambar 4.10: Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	70
Gambar 4.11: Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	70
Gambar 4.12: Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	71
Gambar 4.13: Tutorial SIMDA Pembuatan SPP-LS.....	71
Gambar 4.14: Tutorial Pembuatan SPM	72
Gambar 4.15: Tutorial Pembuatan SPM	72
Gambar 4.16: Tutorial Pembuatan SPM	73
Gambar 4.17: Tutorial Pembuatan SPM	73
Gambar 4.18: Tutorial Pembuatan SPM	74
Gambar 4.19 Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	75
Gambar 4.20: Kualifikasi Pelaksanaan Operator SIMDA.....	78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1: Daftar Golongan PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	2
Tabel 1.2: Program Aplikasi SIMDA.....	6
Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1: Variabel Penelitian	27
Tabel 4.1: Anggota Partai.....	33
Tabel 4.2: Anggota Fraksi	34
Tabel 4.3: Rencana Kerja Anggaran Belanja Gaji Pegawai 2017.....	59
Tabel 4.4: Laporan Realisasi Anggaran Belanja gaji Pegawai 2017.....	65
Tabel 4.5: Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	66
Tabel 4.6: Rekapitulasi Analisis.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat izin penelitian dari Fakultas	89
2. Surat Balasan Dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	90
3. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi	91
4. Surat Konsultasi seminar Usulan Skripsi	92
5. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	97
6. Kartu Konsultasi Skripsi	98
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara	101
8. Permendagri No 21 Tahun 2011	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tertera dalam paragraf 9 pasal 79 berbunyi sebagai berikut: “(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.”.

Anggaran belanja memuat pembiayaan dalam daerah seperti penyediaan uang persediaan, ganti uang dan belanja langsung. Belanja langsung memuat belanja gaji pegawai, tambahan penghasilan, dan belanja penunjang operasional dan lain-lain. Untuk belanja pegawai, dikarenakan merupakan anggaran yang diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja, maka dalam pencairannya harus mematuhi peraturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Peraturan tersebut mengatur seperti pihak yang terlibat dalam pencairan gaji, dokumen yang harus dilengkapi saat ingin mencairkan gaji, dan mengatur hal lain. Pencairan gaji yang termuat khususnya untuk gaji pegawai negeri sipil yang bekerja bagi pemerintah daerah langkah pencairan tidaklah mudah, karena diatur oleh peraturan daerah.

Proses pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dibuat setiap bulannya oleh seorang pembantu bendahara pengeluaran atas perintah dari bendahara pengeluaran berdasarkan prosedur yang

berlaku, di mana pegawai negeri sipil di sekretariat DPRD provinsi Sumatera selatan berjumlah 97 orang yang mana di bagi seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Golongan Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

Golongan	Pegawai Negeri Sipil	Istri	Anak	Jumlah
IV	13	10	15	38
III	68	55	95	218
II	16	12	22	50
I	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	97	77	132	306

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mencairkan gaji 97 orang pegawai negeri sipil tersebut prosedur itu sendiri dimulai dari setiap minggu pertama. Bendahara pengeluaran menunjuk pembantu bendahara pengeluaran untuk *updating* SIMDA gaji, yang terdiri dari :

1. Perubahan Data Pensiun

Apabila pada bulan bersangkutan terdapat pegawai yang pensiun, maka akan di hapuskan dari daftar gaji.

2. Kenaikan Gaji Berkala

Apabila pada bulan bersangkutan terdapat pegawai yang mendapat kenaikan gaji, maka akan di tambahkan dengan gaji sebelumnya.

3. Tunjangan Keluarga (istri/suami dan anak)

Apabila pada bulan bersangkutan terdapat penambahan atau pengurangan jumlah keluarga seperti adanya pernikahan, kelahiran/kematian anak dan kematian istri/suami, maka akan ada penambahan/pengurangan tunjangan sesuai dengan kondisi pada bulan bersangkutan.

4. Kenaikan Pangkat

Apabila pada bulan bersangkutan terdapat pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat, maka secara otomatis akan ada penambahan jumlah gaji pada pegawai bersangkutan.

5. Perpindahan Pegawai

Apabila pada bulan yang bersangkutan terdapat pegawai yang di mutasi, maka akan dihapuskan dari daftar gaji.

Selanjutnya setiap minggu kedua pada bulan yang bersangkutan, bendahara pengeluaran membuat daftar gaji, yang terdiri dari:

1. Data Pegawai

Nama, tanggal lahir, Nomor Induk Pegawai (NIP), status pegawai, jabatan, ruang, kawin/tidak kawin, dan kode jiwa.

2. Gaji Pokok

3. Tunjangan Istri/Suami.

- 10% dari gaji pokok.
- 4. Tunjangan Anak
 - 2% dari gaji pokok (per jiwa)
- 5. Tunjangan Umum
 - a. Golongan I : 175.000
 - b. Golongan II : 180.000
 - c. Golongan III : 185.000
 - d. Golongan IV : 190.000
- 6. Tambahan Tunjangan Umum
- 7. Tunjangan Struktural
 - a. Eselon II : 3.250.000
 - b. Eselon III : 1.250.000
 - c. Eselon IV : 540.000
- 8. Tunjangan Fungsional
- 9. Tunjangan Beras
 - 67.500 per jiwa
- 10. Tunjangan PPh
- 11. Jumlah Potongan
 - a. PFK : 10% dari gaji pokok + tunjangan keluarga
 - b. PPh
 - c. Sewa rumah
 - d. Hutang
 - e. Tabungan rumah

Selanjutnya setiap minggu ketiga pada bulan bersangkutan, pembantu bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) terdiri dari 3 halaman dengan rincian :

1. Halaman Pertama

Urusan pemerintahan, SKPD, tahun anggaran, dasar pengeluaran SPD nomor, jumlah sisa dana SPD, untuk keperluan bulan, nama bendahara pengeluaran, jumlah pembayaran yang diminta, nama dan nomor rekening bank, yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran.

2. Halaman Kedua

Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD (jumlah dana DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD), ringkasan SPD (jumlah dana dan sisa dana yang belum di SPD-kan),

ringkasan belanja (belanja UP/GU, belanja TU, belanja LS pembiayaan gaji dan tunjangan, belanja LS pengadaan barang dan jasa), yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran.

3. Halaman Ketiga

Rincian rencana penggunaan (gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, pembulatan gaji), yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu pengeluaran.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) ini ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran dalam hal ini sekretaris dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, agar hendaknya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya pada minggu yang sama, kuasa pengguna anggaran memberikan tugas kepada operator SPM untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang nantinya ditanda tangani oleh pengguna anggaran sebagai bukti telah disetujuinya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut. Surat Perintah Membayar (SPM) ini berisi rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Gaji Pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus dan pembulatan gaji.

2. Potongan-Potongan

Iuran wajib, PPh 21 dan tabungan perumahan.

Lalu Surat Perintah Membayar (SPM) ini dikirim ke Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah agar hendaknya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya setiap awal bulan pada bulan berikutnya,

BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada kas daerah agar hendaknya mencairkan uang kepada Bank Sumsel Babel cabang utama untuk dipindah bukukan ke rekening masing-masing pegawai yang bersangkutan. Lalu tembusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) itu diberikan kepada bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, pada awal bulan juga, uang cair ke rekening masing-masing pegawai sebagai imbalan dari hasil bekerja. Dan pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan mekanisme komputerisasi yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu aplikasi terpadu yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Fitur-fitur yang digunakanpun cukup sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini (output dokumen transaksi seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D), secara otomatis catatan.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah (Pratama, 2016 : 157).

SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. Salah satu aplikasi SIMDA yaitu SIMDA keuangan dimana merupakan sebuah aplikasi yang memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah mengelola keuangan daerah (Pratama, 2016 : 157). Sehingga, dengan adanya aplikasi SIMDA ini sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan bisa melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan terintegrasi yang diawali dengan penganggaran, penatausahaan sampai akuntansi dan pelaporan.

Hasil pengembangan SIMDA adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Program Aplikasi SIMDA

1.	Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
4.	Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5.	Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6.	Sub Aplikasi Gabungan perProvinsi
7.	Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Sumber: web BPKP go.id

Dari pengembangan aplikasi SIMDA kali ini penulis lebih memfokuskan ke aplikasi SIMDA Gaji yang digunakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam prosedur Pencairan gaji pegawai negeri sipilnya. Yang mana aplikasi komputer SIMDA Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini akan membantu instansi untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen

penggajian yang dapat diandalkan. Ouput dari aplikasi SIMDA gaji adalah sebagai berikut :

1. Daftar Gaji, Rapel, Gaji Terusan, Perhitungan Pajak.
2. Daftar Pegawai.
3. Register-Register.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. pemerintah saat ini sedang mengembangkan suatu program aplikasi komputer yang di beri nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang mulai diperkenalkan pada tahun 2006. Program aplikasi ini sendiri dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu pengelolaan Keuangan Daerah baik di tingkat SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai entitas pelaporan maupun di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) entitas akuntansi. Dengan adanya program aplikasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan tanggung jawab APBD (Pratama, 2016 : 154).

Upaya mengevaluasi suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep evaluasi. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Konsep evaluasi menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Sasaran evaluasi adalah mengetahui keberhasilan suatu program. Sebagaimana Bruce W Tuckman (1975 : 12) mengartikan evaluasi sebagai suatu

proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi sampai keluaran (*output*), dan dampak (*impact*) dari program tersebut telah sesuai dengan tujuan program bersangkutan. Dan juga peranan penting sekretaris dewan sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh para pegawai yang terlibat dalam proses pencairan gaji harus mampu melaksanakan tugas agar prosedur dalam pencairan gaji pegawai dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan dan penerapan SIMDA di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dalam pengelolaan SIMDA, dengan kenaikan aset dan kewajiban ekuitas yang terjadi di sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan, maka semakin kompleks pula masalah dalam proses pengelolaan keuangannya, penerapan SIMDA keuangan yang dilakukan diharapkan mampu mempermudah pelaksanaan dalam proses laporan keuangannya, namun yang terjadi di sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan kenaikan tersebut tidak diiringi dengan perbaikan infrastruktur yang mendukung seperti pembangunan jaringan internet yang lancar tanpa hambatan dan mampu memperlancar pelaksanaan aplikasi SIMDA. Beberapa faktor lain yang masih memerlukan peningkatan dalam rangka mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) antara lain: kelemahan dalam pengelolaan barang/aset milik daerah, kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah masih belum memadai.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS)

Setelah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“EVALUASI KINERJA PENCAIRAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SETELAH MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Bagi pegawai, masalah pencairan gaji merupakan salah satu hal yang utama untuk tetap *survive*. Dan merupakan hak dari setiap pegawai yang telah mengabdikan dirinya sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tertera dalam pasal 79. Bila dilihat dari aspek manajemen, maka proses pencairan gaji pegawai dapat dipandang sebagai suatu perbaikan yang terus menerus untuk menghasilkan kesejahteraan pegawai. Sehingga membuat munculnya sistem dengan penerapan teknologi dalam proses pencairan gaji pegawai negeri sipil. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dirumuskan masalah pokok yang perlu mendapat kajian secara mendalam yaitu **“Mengapa Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki kendala setelah menerapkan aplikasi SIMDA Gaji?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setelah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) gaji di sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat bagi peneliti yakni sebagai latihan dalam penulisan dan penelitian yang bersifat ilmiah. Manfaat lain adalah penelitian ini mampu menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai evaluasi kinerja pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setelah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sumbangsih dan saran serta referensi kepada kantor DPRD provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) setelah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) di sekretariat DPRD provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong. 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, I. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tuckman, B. W. 1975. *Measuring Educational Outcomes: Fundamental of Testing*. America: Harcourt Brace Jovanovich.
- Yin, R. K. 2005. *Studi kasus desain dan metode*. Penerjemah : M. Djauzi Mudzakir. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal Dari Internet:

- Anggraini, D. 2013. *Pengembangan Kompetensi Aparatur di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda (Studi Evaluasi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 43 Tahun 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural)*. (Online), Vol. 1, No. 3, (<http://www.portal.fisipunmul.ac.id/site/?p=1034>, diakses 28 September 2017).
- Derendehe, A. 2013. *Gaji, Kepemimpinan, dan Sikap Rekan Kerja Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan PT. Askes (Persero) Cabang Manado*. (Online), Vol. 1, No. 4, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2554>, diakses 1 Oktober 2017).
- Divayana, D. G. H. & Sugiarni, G. A. D. 2016. *Evaluasi Program Sertifikasi Komputer pada Universitas Teknologi Indonesia Menggunakan Model Cse-Ucla*. (Online), Vol. 5, No. 2, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/8586>, diakses 27 September 2017).
- Handoko, H. & Wuradji. 2015. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di Kabupaten Kulon Progo*. (Online), Vol. 2, No. 1, (<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/4841>, diakses 28 September 2017).
- Legi, dkk. 2015. *Implementasi Pendekatan Bottom-Up dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*. (Online), Vol. 1, No. 10, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/6537>, diakses 15 Januari 2018)

- Mayasari, dkk. 2014. *Evaluasi Status Gizi dan Prestasi Belajar pada Murid Sekolah Dasar Negeri Samar Kilang Kabupaten Bener Meriah Tahun Pelajaran 2012/2013*. (Online), Vol. 2, No. 3, (<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7498>, diakses 29 September 2017).
- Munthe, A. P. 2015. *Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar Pengertian, Tujuan Dan Manfaat*. (Online), Vol. 5, No. 2, (<http://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/download/13/12>, diakses 28 September 2017).
- Murty, W. 2012. *Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di Surabaya)*. (Online), Vol. 2, No. 2, (<https://journal.perbanas.ac.id/index.php/tiar/article/view/97>, diakses 7 maret 2018).
- Muryadi, A. D. 2015. *Evaluasi Program Pembinaan Sepakbola Klub Persijap Jepara. Jurnal Ilmiah Penjas*. (Online), Vol. 1, No. 2, (<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/323>, diakses 29 September 2017).
- Pratama, S. Y. 2016. *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. (Online), Vol. 4, No. 2, (<http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/600/550>, diakses 7 Maret 2018).
- Pulungan, M. S. 2014. *Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas*. (Online), Vol. 6, No. 4, (<http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/article/view/16>, diakses 5 Maret 2018).
- Utami, A. & Sari, Y. P. 2017. *Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda)-Barang Milik Daerah (BMD) pada DPPKAD Kabupaten Pematang*. (Online), Vol. 6, No. 1, (<http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/454/412>, diakses 7 Maret 2018).
- Wahyuningsih, D. 2018. *Representasi Ritual Upacara Kematian Adat Suku Toraja Dalam Program Dokumenter Indonesia Bagus Net Tv Episode Toraja*. (Online), Vol. 6, No. 1, ([http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2018/01/JURNAL%20FIX%20tanpa%20cover%20\(01-18-18-12-54-04\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2018/01/JURNAL%20FIX%20tanpa%20cover%20(01-18-18-12-54-04).pdf), di akses 15 Januari 2018).
- Zuana, K. R. & Sidharta, I. 2014. *Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik*. (Online), Vol. 8, No. 2, (<http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/120>, diakses pada 1 Oktober 2017).

Seminar :

- Nussy, L. P. & Tanaamah, A. R. 2015. *Evaluasi Tingkat Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi Simda Menggunakan Technology Acceptance Model pada Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tengah*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Teknologi Informasi, Universitas Tarumanegara, Jakarta barat, 21 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tertera Dalam Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Sekretariat DPRD.

Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.